

Tinjauan Mata Kuliah

Mata kuliah IPEM4111 “Pengantar Ilmu Pemerintahan” merupakan mata kuliah wajib yang ditempuh oleh mahasiswa yang mengambil Program Studi Ilmu Pemerintahan. Mata kuliah tersebut sebaiknya diregistrasi pada semester-semester awal perkuliahan, karena materi yang terkandung di dalamnya berisi konsep dasar yang berkaitan dengan pembahasan mata kuliah-mata kuliah selanjutnya.

Kompetensi umum yang diharapkan setelah mahasiswa menempuh mata kuliah “Pengantar Ilmu Pemerintahan” adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep dan teori-teori yang berkaitan dengan komponen-komponen pemerintahan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

Pembahasan mata kuliah ini diawali dengan uraian perihal pemerintah dan yang diperintah; yang dilanjutkan dengan perkembangan ilmu pemerintahan sebagai disiplin ilmu, sejarah pertumbuhan pemerintahan dan ilmu pemerintahan; filsafat pemerintahan dan etika pemerintahan; administrasi pemerintahan dan birokrasi pemerintahan; organisasi dan manajemen pemerintahan; kepemimpinan pemerintahan; kebijakan pemerintahan dan komunikasi pemerintahan; serta ekologi pemerintahan.

Uraian pembahasan mata kuliah “Pengantar Ilmu Pemerintahan” dibagi menjadi 9 (sembilan) modul. Masing-masing modul terdiri dari uraian dan pembahasan, latihan, petunjuk jawaban latihan, rangkuman, tes formatif, dan daftar pustaka.

Modul 1 berisi bahasan “Perihal Pemerintah dan Yang Diperintah”. Modul ini membahas tentang “Pengertian Pemerintah dan Pemerintahan yang meliputi terbentuknya pemerintah dan pemerintahan; tugas pemerintah; fungsi pemerintah; wewenang pemerintah; kewajiban pemerintah; tanggung jawab pemerintah; pelayanan *public*; *government* dan *governance*. Selain itu, juga membahas “Perihal Yang Diperintah”, yang meliputi pengertian yang diperintah; yang diperintah dalam konsep penduduk, masyarakat, rakyat, dan warga negara; yang diperintah sebagai pelanggan dan konsumen; pelayanan publik (jasa publik); layanan sipil; *civil society* (masyarakat sipil); kontrol sosial; serta hubungan antara pemerintah dan yang diperintah.

Modul 2 berisi bahasan tentang “Perkembangan Ilmu Pemerintahan sebagai Disiplin Ilmu”. Pada modul ini dibahas secara mendalam ilmu pemerintahan sebagai disiplin ilmu, yang meliputi obyek material dan obyek forma ilmu pemerintahan; ruang lingkup ilmu pemerintahan; asas-asas ilmu pemerintahan; teknik-teknik ilmu pemerintahan; dan hubungan-hubungan ilmu pemerintahan dengan ilmu lainnya, seperti ilmu politik, ilmu negara, administrasi negara, hukum tata negara, geografi, sejarah, psikologi, ekonomi, filsafat, dan lain sebagainya.

Modul 3 berisi bahasan tentang “Sejarah Pertumbuhan Pemerintahan dan Ilmu Pemerintahan”, yang meliputi bahasan tentang awal dari pemerintahan sampai pemerintahan di zaman modern serta pendekatan-pendekatan dalam perkembangan

ilmu pemerintahan. Selanjutnya, dibahas tentang perkembangan ilmu pemerintahan yang memunculkan kajian ilmu manajemen pemerintahan.

Modul 4 berisi bahasan tentang “Filsafat dan Etika Pemerintahan”. Dalam membahas filsafat pemerintahan diuraikan tentang latar belakang filsafat ilmu pemerintahan; filsafat pemerintahan; hubungan filsafat dengan ilmu pemerintahan; serta perkembangan filsafat pemerintahan. Pembahasan selanjutnya tentang etika pemerintahan diuraikan tentang etika sebagai bagian dari filsafat; etika dan ajaran moral; alasan perlunya etika dalam pemerintahan; konsep-konsep dalam etika pemerintahan; tinjauan etika pemerintahan atas negara (tugas negara); etika pemerintahan dan lembaga eksekutif.

Modul 5 berisi bahasan tentang “Administrasi Pemerintahan dan Birokrasi Pemerintahan”. Bahasan administrasi pemerintahan meliputi definisi administrasi pemerintahan; ruang lingkup administrasi pemerintahan dalam kajian ilmu pemerintahan; hubungan antara administrasi pemerintahan dengan kebijakan pemerintahan; administrasi pemerintahan dalam perspektif pemerintahan di Indonesia; perkembangan paradigma administrasi pemerintahan/negara/publik: paradigma baru dalam administrasi pemerintahan/negara/ publik. Selanjutnya, bahasan “Birokrasi Pemerintahan” meliputi pengertian birokrasi; pengertian birokrasi pemerintahan; model-model birokrasi; karakteristik birokrasi pemerintahan; peran birokrasi dalam pemerintahan modern; birokrasi dan masyarakat; hubungan antara birokrasi, administrasi dan pemerintahan; demokratisasi birokrasi, hubungan demokrasi dan birokrasi, serta transformasi birokrasi dan demokrasi menuju efisiensi.

Modul 6 berisi bahasan tentang “Organisasi dan Manajemen Pemerintahan”. Bahasan organisasi pemerintahan meliputi hakikat organisasi pemerintahan; pengertian organisasi pemerintahan; asas-asas organisasi pemerintahan; fungsi-fungsi dalam organisasi pemerintahan; pergeseran peran organisasi pemerintahan (organisasi publik); faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran peran organisasi pemerintahan (organisasi publik); efektivitas organisasi pemerintahan; serta perkembangan struktur organisasi pelayanan pada pemerintahan Indonesia. Selanjutnya, bahasan tentang manajemen pemerintahan meliputi pengertian manajemen pemerintahan; perbedaan antara ilmu pemerintahan dengan manajemen pemerintahan; hubungan ilmu pemerintahan dengan manajemen pemerintahan; fungsi-fungsi manajemen pemerintahan; asas-asas manajemen pemerintahan; perkembangan manajemen pemerintahan di Indonesia; *new public management*, serta *new publik services*.

Modul 7 menguraikan tentang “Kepemimpinan Pemerintahan”. Bahasannya meliputi 2 Kegiatan Belajar. Kegiatan belajar 1 membahas tentang pengertian pimpinan, pemimpin dan kepemimpinan; pengertian kepemimpinan pemerintahan; variabel-variabel kepemimpinan pemerintahan; fungsi kepemimpinan pemerintahan; hubungan antara faktor kepemimpinan dan kualitas Pelayanan. Sedangkan bahasan Kegiatan Belajar 2 membahas tentang model kepemimpinan pemerintahan; gaya kepemimpinan pemerintahan; teknik kepemimpinan pemerintahan; serta pelaksanaan kepemimpinan pemerintahan di Indonesia.

Modul 8 menguraikan tentang “Kebijakan Pemerintahan dan Komunikasi Pemerintahan”. Dalam Kegiatan Belajar 1 dibahas tentang pengertian kebijakan; pengertian kebijakan pemerintahan; proses kebijakan pemerintahan; rintangan yang muncul dalam proses kebijakan pemerintahan; tahapan-tahapan kebijakan pemerintahan; perumusan kebijakan pemerintahan; implementasi kebijakan pemerintahan; serta evaluasi kebijakan pemerintahan. Dalam Kegiatan Belajar 2 dibahas tentang definisi komunikasi; definisi komunikasi pemerintahan; unsur-unsur komunikasi dalam pemerintahan; pentingnya komunikasi dalam pemerintahan; kaitan antara kebijakan pemerintahan dengan komunikasi pemerintahan; media (saluran-saluran) dalam komunikasi pemerintahan; partisipasi masyarakat dalam pemerintahan.

Modul 9 membahas tentang “Ekologi Pemerintahan” yang terbagi dalam 2 kegiatan belajar. Dalam Kegiatan Belajar 1 dibahas tentang pengertian ekologi; kaitan ekologi dengan pemerintahan; pengertian ekologi pemerintahan; ruang lingkup ekologi pemerintahan; faktor-faktor ekologi pemerintahan; lingkungan fisik pemerintahan; dan lingkungan sosial pemerintahan. Dalam kegiatan belajar 2 dibahas tentang peranan ekologi pemerintahan dalam pembangunan; kaitan teknologi dengan pemerintahan; sistem teknologi pemerintahan; pelaku teknologi pemerintahan; *electronic government* (*e-gov*), serta hubungan antara *e-gov* dengan *good governance*.

Untuk memudahkan mahasiswa dalam mempelajari keseluruhan materi yang terkandung dalam mata kuliah “Pengantar Ilmu Pemerintahan”, beberapa mahasiswa dapat membentuk kelompok belajar mandiri atau bergabung dengan kelompok belajar yang sudah ada. Untuk itu, mahasiswa dapat menghubungi Unit Pelayanan Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) yang terdekat, yang tersebar di berbagai kota di Indonesia atau mahasiswa yang memanfaatkan layanan belajar jarak jauh yang diselenggarakan oleh Universitas Terbuka, seperti Tutorial Elektronik (Tuton).

Untuk memperoleh gambaran umum tentang isi mata kuliah ini, silahkan diperhatikan skema pembahasan Peta Kompetensi di bawah ini.

Peta Kompetensi
Pengantar Ilmu Pemerintahan/IPEM4111/3 sks

